



PERAN PEMILU DI INDONESIA

OLEH :

DRA. SUSANTI

NIP. 132 052 021

UNIVERSITAS TERBUKA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

1995

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan anugerah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan makalah dengan judul : "Peran Pemilu di Indonesia".

Makalah ini disusun untuk memenuhi pengembangan disiplin ilmu pemerintahan yang telah berkembang demikian pesat sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Penyusunan makalah ini tidak lepas dari pengarahan serta bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada rekan-rekan FISIP Universitas Terbuka.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak. Akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu pemerintahan serta bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Jakarta 1995

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
BAB II PEMBAHASAN MASALAH	5
A. Aspek Rekrutmen Politik	6
B. Aspek Input	9
C. Aspek Output	12
BAB III KESIMPULAN	16
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bagi negara demokrasi, pemilu merupakan aktivitas politik yang sangat penting. Oleh sebab itu setiap warga negara yang mempunyai hak pilih aktif ataupun pasif sebaiknya dapat memahami dan menghayati secara obyektif berbagai persoalan dan aspirasinya, baik untuk kepentingan bersama/kelompok maupun kepentingan individu secara jujur. Perkembangan menarik dalam sistem kepolitikan di Indonesia dewasa ini adalah munculnya upaya untuk terus memperbaiki sistem pemilu menuju situasi yang lebih demokratis. Hal ini untuk menghilangkan kesan dan pandangan yang menilai seolah-olah demokrasi di Indonesia adalah demokrasi semu.¹⁾

Sebenarnya harapan dan tujuan yang tertuang di dalam pemilu terutama yang berkaitan dengan mekanisme politik atau kekuasaan dan segala akibatnya adalah benar-benar mulia. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah harapan dan tujuan yang terkandung dalam pemilu itu bisa tercapai. Keberhasilan pemilu secara ideal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : organisasi peserta pemilu, aktor politik, masyarakat pemilih, peraturan perundang-undangan dan proses pemilu itu sendiri.

Pemilu sebagai sarana mekanisme politik merupakan aktivitas pemerintahan yang strategis dalam kehidupan negara.

1). AH. Bahrudin; Sistem Distrik, Akankah Lebih Demokratis ? dalam Suara Merdeka; 9 Maret 1995.

Sebab hal ini berkaitan dengan peran pemilu itu sendiri yang sangat strategis. Akan tetapi pemilu dapat berperan sebagaimana yang diharapkan tergantung pula kepada pandangan setiap individu terhadap pemilu itu sendiri. Apakah pemilu hanya dianggap sebagai suatu formalitas dalam memilih salah satu tanda gambar yang ada atau setiap individu yang memilih hanya mengikuti arus ikut-ikutan saja. Sikap apatis terhadap pemilu ini mungkin disebabkan adanya pemikiran dari setiap individu bahwa pemilu tidak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Bila dilihat dari pelaksanaan pemilu selama ini, terutama semasa pemerintahan orde baru, dapat dinilai sukses. Dengan tolak ukur : penyelenggaraan pemilu yang tertib dan teratur, pelaksanaannya yang tidak menimbulkan keresahan politik dan besarnya jumlah pemilih. Tetapi bila dilihat dari segi kualitas dan cita-cita demokrasi Pancasila, maka diharapkan DPR sebagai wakil rakyat mampu menyanggah hasil pemilu sebagai input sekaligus output politik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh Almond, bahwa proses politik dimulai dengan masuknya input-input berupa kepentingan yang diartikulasikan atau dinyatakan oleh kelompok kepentingan dan diagregasikan atau dipadukan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijaksanaan yang lebih umum. Usulan kebijaksanaan yang bersifat umum ini selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijaksanaan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif. Dalam tahap konversi ini, input diubah menjadi output berupa kebijaksanaan;

dan tahap inilah yang merupakan inti dari keseluruhan sistem politik. Kebijakan itu kemudian dilaksanakan oleh birokrasi, dan kesungguhan pelaksanaan itu dijamin oleh adanya fungsi penghakiman yang dijalankan oleh badan peradilan. Sementara itu, dalam setiap tahap proses politik itu juga berjalan fungsi-fungsi sosialisasi politik, komunikasi politik dan rekrutmen politik.²⁾ Akan tetapi nampaknya dalam proses politik yang demikian masih perlu dikaji lebih mendalam. Tindakan DPR yang hanya memandang hasil pemilu sebagai input sekaligus output politik yang harus dilaksanakan pemerintah itu, menunjukkan bahwa partisipasi warga negara melalui pemilu hanya nampak dalam proses pengambilan keputusan politik. Sebagaimana Almond dan Verba menyatakan bahwa jika sistem politik demokrasi adalah merupakan suatu dimana warga negara biasa dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kebudayaan politik demokrasi akan memuat seperangkat keyakinan, sikap, norma dan persepsi yang sejenis yang mendukung partisipasi. Tentu saja frekuensi kesediaan terhadap norma-norma ini akan dipengaruhi struktur lokal.³⁾ Jadi sistem politik demokrasi memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi, tidak terbatas pada pemegang kekuasaan saja. Oleh sebab itu setiap

2). Masoed, Mochtar dan Colin Mac Andrews; Perbandingan Sistem Politik; Gadjah Mada University Press; Yogyakarta; 1987; hal.xiii

3). Almond, Gabriel dan Sidney Verba; Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara; Bina Aksara; Jakarta; 1984; hal. 169.

warga negara sebaiknya juga memahami bahwa dirinya dapat mempengaruhi pengambilan dan pelaksanaan keputusan melalui pemilu.

Pandangan subyektif tentang wewenang setiap warga negara mengemukakan, bahwa setiap warga negara berkepentingan untuk menetapkan segala bentuk sikap di dalam negara. Jika demokrasi melibatkan warga negara dalam pembuatan keputusan, maka sikap warga negara akan mencakup persepsi faktual bahwa mereka mampu berpartisipasi. Dalam hal ini Almond dan Verba menyatakan bahwa persepsi kemampuan untuk memaksakan pengaruh politik ini sangat penting, sekalipun individu jarang menggunakan pengaruh tersebut atau sering tidak berhasil ketika dicoba.⁴⁾ Walaupun persepsi dan kemampuan berperan dalam pembuatan keputusan tidak pernah dicoba atau sering tidak berhasil ketika dicoba, akan tetapi di dalam pemilu setiap warga negara bisa menggunakan pengaruhnya itu melalui pilihan yang ditentukan, dengan demikian paling tidak aspirasi mereka sudah disalurkan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang timbul adalah :

1. Bagaimana peran pemilu di Indonesia dilihat dari aspek rekrutmen politik, input dan output ?
2. Apakah pemilu di Indonesia sudah mencerminkan ketiga aspek di atas, maksudnya aspek rekrutmen politik, input dan output ?

4). Ibid; hal. 175.

A. ASPEK REKRUTMEN POLITIK

Setiap sistem politik mempunyai prosedur tertentu untuk rekrutmen pejabat-pejabat pemerintahan dan politik. Rekrutmen politik merupakan fungsi penseleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. Pemilu berperan sebagai rekrutmen politik, artinya pemilu berhubungan erat dengan proses sosialisasi politik, sebab dalam proses rekrutmen politik harus memenuhi persyaratan tertentu. Salah satu persyaratan itu adalah warga negara sudah tersosialisasi politik yang relatif memadai. Artinya individu yang telah memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu akan diangkat atau dipilih menjadi aktor politik.⁶⁾

Aspek rekrutmen politik di sini artinya adalah suatu proses seleksi, pengangkatan atau pemilihan seseorang atau sekelompok orang ke dalam berbagai struktur politik untuk kemudian melaksanakan peran-peran politik dalam sistem politik. Jadi merupakan suatu proses dengan cara bagaimana peran-peran politik itu diisi oleh para aktor politik. Untuk mencapai peran-peran politik dalam suatu negara demokrasi, pemilu merupakan cara yang paling efektif. Sebab dengan pemilu akan didapatkan aktor-aktor politik yang sesuai dengan aspirasi seluruh warga

6). Surbakti, Ramlan; Perbandingan Sistem Politik; Macphiso Grafika; Surabaya; 1984; hal. 97.

negara. Aktor-aktor politik yang dimaksud adalah individu yang mempunyai ciri-ciri personalitas kaum demokrat. Menurut Lasswell, ciri tersebut adalah (1) "open ego" (sifat keakuan yang terbuka) artinya orang tersebut memiliki sifat-sifat ekstrovert; (2) kapasitas untuk membentuk sejumlah nilai dengan yang lain; (3) lebih berorientasi pada nilai-nilai yang serba ragam ketimbang satu nilai saja; (4) percaya dan yakin terhadap lingkungan sosialnya dan (5) relatif memiliki kebebasan dari kecemasan.⁷⁾ Nampaknya proses rekrutmen politik di Indonesia belum berperan sepenuhnya. Sebab prosesnya lebih banyak dilakukan pada proses di luar pemilu, yang dilakukan partai politik dan Golkar. Sehingga pemilu seakan-akan merupakan sarana legitimasi kekuasaan yang sebelumnya telah disusun oleh partai politik dan Golkar sebagai organisasi peserta pemilu. Di samping itu pemilu di Indonesia belum dapat dijadikan wadah untuk seleksi warga negara yang berkualitas dan berjiwa pengabdian untuk dimunculkan sebagai aktor politik baru. Selanjutnya lembaga legislatif juga belum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Kenyataan ini diakui oleh elite politik yang duduk di DPR dan yang dicalonkan sebagai anggota DPR. Munculnya sedikit aktor-aktor politik baru dalam setiap pemilu di Indonesia sebenarnya berhubungan erat dengan pengaruh budaya Jawa.

7). Lasswell dalam Gabriel Almond dan Sidney Verba; op.cit.; hal. 11.

Yaitu adanya perasaan sungkan, rikuh dan penuh tenggang rasa untuk mengganti kedudukan seseorang, lebih-lebih orang itu telah berjasa pada negara. Dengan demikian dalam masyarakat Jawa, individu berada di bawah tekanan untuk terus menerus mengontrol dorongan-dorongan spontannya (emosinya) dan berusaha menyesuaikan diri dengan berbagai otoritas. Salah satu tempat yang bebas untuk mengeluarkan dorongan-dorongan spontan (emosi) itu hanyalah keluarga.⁸⁾

Adanya pengaruh budaya Jawa pada lembaga legislatif yang demikian itu, maka kehidupan lembaga negara tertinggi pun (MPR) tidak jauh berbeda. Pada hal lembaga ini (MPR) yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian peran pemilu sebagai proses rekrutmen politik belum mempunyai banyak arti dalam eksekutif. Agar peran rekrutmen politik dalam pemilu dapat berjalan sesuai dengan aspirasi seluruh rakyat Indonesia, maka diperlukan adanya kriteria yang jelas. Menurut Almond dan Verba, proses rekrutmen politik pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan dua kriteria, yaitu kriteria universal dan partikularistik.⁹⁾ Kriteria universal menyangkut seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang ditunjukkan lewat tes/ujian atau berdasarkan bukti-bukti pengalaman dan prestasi. Sedang kriteria

8). Suseno, Franz Magnis; Etika Jawa; Gramedia; Jakarta; 1985; hal. 168-169.

9). Almond, Gabriel dan John Powell; Comparative Politics a Developmental Approach; Little Brown; Boston; 1966; hal. 16-23.

partikularistik artinya proses seleksi dan pengangkatan untuk memainkan peranan politik berdasarkan faktor-faktor primordial (suku, agama, ras, dan keluarga) ataupun berdasarkan status sosial. Proses rekrutmen politik di Indonesia nampaknya bersifat partikularistik, yaitu loyalitas atau kesetiaan kepada organisasi, pemerintah dan aturan yang bersifat formal. Artinya kemampuan dan kepopuleran seseorang, tidak merupakan jaminan untuk diangkat atau dipilih sebagai aktor dalam sistem politik kalau yang bersangkutan tidak memiliki sikap loyal kepada organisasi induknya dan pemerintah.

B. ASPEK INPUT

Untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan adanya input-input secara berkesinambungan. Tanpa input, sistem tidak akan dapat berfungsi; tanpa output, kita tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem itu. Aspek input sendiri dapat berupa tuntutan ataupun dukungan terhadap sistem politik. Setiap sistem politik mempunyai berbagai cara dan bentuk untuk memproses tuntutan menjadi keputusan politik. Keputusan politik dapat berdampak positif atau negatif terhadap setiap warga negara, baik sebagai individu atau kelompok dalam masyarakat, termasuk elite politik itu sendiri. Setiap warga negara yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, maka secara tidak langsung telah mengajukan tuntutan ataupun dukungan yang berupa aspirasi baik secara individu

maupun kelompok. Tuntutan ataupun dukungan ini merupakan masukan dan sekaligus tantangan yang harus diselesaikan bagi para pengambil keputusan, setidaknya-tidaknya dapat dijadikan dasar bagi sejumlah alternatif politik yang ada.

Dalam pemilu setiap organisasi peserta pemilu atau kontestan yang ada selalu berusaha untuk mendapatkan dukungan massa sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu kapasitas kontestan dalam mengartikulasikan aspirasi pemilih akan menentukan dalam merebut simpati masyarakat. Persoalannya adalah apakah aspirasi pemilih yang diajukan melalui pemilu itu dapat terealisasi atau tidak. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, antara lain : lembaga-lembaga politik yang ada, aktor-aktor politik, persepsi dan tingkah laku warga negara. Setiap warga negara sebaiknya tahu dan mampu memahami bahwa mereka memiliki pengaruh untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Dengan demikian mereka dapat melakukan sesuatu apabila setiap keputusan pemerintah dibuat tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak.

Hasil pemilu di Indonesia belum sepenuhnya memberikan input terhadap supra struktur politik, hal ini disebabkan karena :¹⁰⁾

1. Pemilih menyerahkan haknya secara kategorik kepada partai politik dan Golkar untuk menentukan daftar urut dalam sistem pemilu di Indonesia. Jadi pemilihan tidak langsung kepada calon anggota legislatif, dengan demikian sangat tergantung

10). Kantaprawira, Rusadi; op.cit.; hal. 41-42.

pada kapasitas partai politik atau Golkar dalam proses agregasi dan artikulasi kepentingan.

2. Budaya politik Indonesia yang bersifat parokial subyek di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak. Di satu sisi masyarakat masih ketinggalan di dalam menggunakan hak-hak dan tanggung jawab politiknya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh isolasi dari kontak dengan dunia luar, pengaruh penjajah, feodalisme, ikatan primordial dan sebagainya. Sedang di sisi lain pihak elite sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif yang mungkin disebabkan karena pengaruh pendidikan Barat yang modern.
3. Sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikator berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu : puritanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
4. Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhkan sikap paternalisme dan sifat patrimonial, sebagai indikator dapat disebutkan antara lain : bapakisme, sikap asal bapak senang. Di Indonesia, budaya politik tipe parokial subyek lebih mempunyai keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap obyek politik yang bersandar pada proses output dari penguasa.

Aspirasi para pemilih di Indonesia sulit untuk dirumuskan karena warga negara belum sepenuhnya memahami secara benar tentang hak dan kewajibannya dalam pemilu dan dalam hubungannya

dengan pengambilan keputusan politik. Dengan demikian pemilu merupakan suatu proses dimana warga negara menyerahkan hak-hak politiknya kepada penguasa dan aktivitas politik berikutnya tergantung pada penguasa dan warga negara siap untuk menerima. Segala keputusan yang diambil oleh penguasa dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, dikoreksi apalagi ditentang. Warga negara harus menerima sistem sebagaimana adanya, yaitu patuh, setia dan mengikuti segala instruksi dari para pemimpin politik.

Tingkat pemahaman politik masyarakat Indonesia terhadap pemilu yang rendah ini menuntut pelaksanaan pendidikan politik yang lebih besar. Pemilu yang dipandang sebagai salah satu sarana pendidikan politik diharapkan mampu untuk membangun dan mengembangkan demokrasi Pancasila, sebab mengembangkan demokrasi berarti meningkatkan kemampuan warga negara untuk memahami dan mengamalkan hak-hak dan wewenangnya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

C. ASPEK OUTPUT

Pengalaman dari hasil pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992 dapat memberi pelajaran bagi kita tentang bagaimana pengaruh pemilu terhadap kehidupan politik di Indonesia, baik secara struktur maupun kultur politik sebagai landasan proses politik. Struktur politik artinya suatu cara bagaimana peran-peran politik dalam sistem politik itu diisi oleh aktor-aktor politik. Sedangkan perubahan fungsi kultural artinya pola sikap

dan orientasi anggota masyarakat politik. Hasil pemilu berpengaruh terhadap orientasi politik melalui tingkah laku dan pola interaksi dari organisasi peserta pemilu. Jadi tujuan pemilu yang pertama adalah proses menentukan struktur politik dan pola interaksi diantara struktur, dan proses inilah yang selanjutnya memberikan warna kepada persepsi politik anggota masyarakat.

Aspek output di sini artinya adalah dampak perilaku kepemimpinan lembaga-lembaga politik yang dikendalikan oleh para pemimpin dari hasil pemilu. Apa yang dihasilkan setelah lembaga-lembaga negara terbentuk dari pemilu ini merupakan peran idealistik dari pemilu, karena menekankan kepada peran tentang bagaimana mencapai tujuan politik di masa mendatang. Seperti peran mewujudkan kehidupan demokrasi, mencapai keberhasilan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sarana pendidikan politik.

Peran output merupakan tindakan kongkret lembaga-lembaga negara dalam merealisasikan partisipasi politik dan tuntutan-tuntutan politik warga negara setelah masa pemilu berakhir. Output ini dapat diamati melalui sikap pemerintah, tingkah laku pemerintah dan perundang-undangan yang dihasilkan. Hasil pemilu pada umumnya membawa dampak terhadap seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya ataupun hankam yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Kebijakan yang nampak dari hasil pemilu terutama jangka menengah dan jangka panjang dapat

dilihat dari GBHN. Sebab GBHN merupakan garis kebijaksanaan yang harus dijalankan oleh Presiden selaku mandataris MPR, sekaligus menjadi kriteria penilaian terhadap tingkat keberhasilan pemerintah. Selain itu, adanya realita bahwa penyusunan GBHN diprakarsai oleh eksekutif dan hanya sedikit perubahan yang dilakukan MPR terhadap rancangan GBHN yang disusun oleh pemerintah. Oleh karena itu GBHN memenuhi syarat mewakili bila dinilai dari pandangan elite pemerintah dan juga dasar konsensus antara pemerintah dengan kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan di Indonesia. Dalam GBHN terdapat pemikiran prinsipil yang melandasi pembangunan politik orde baru. Pendekatan yang dijalankan pemerintah orde baru dalam menampung tuntutan politik seperti yang digunakan GBHN 1993 adalah :¹¹⁾

1. Pendekatan pengembangan nilai-nilai, artinya dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diharapkan dapat memantapkan stabilitas nasional di bidang politik. Dengan demikian diharapkan tidak akan ada disintegrasi nasional yang diakibatkan perbedaan nilai-nilai politik. Pelaksanaan pendekatan ini dilakukan dengan Penataran P4, dan penetapan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Pendekatan kelembagaan, artinya mendorong makin berfungsi dan berperannya lembaga politik, memantapkan perkembangan

 11). UUD 1945, P-4, GBHN; BP-7 Pusat; Jakarta; 1993; hal.62 & 86.

BAB III KESIMPULAN

1. Pemilu di Indonesia masih merupakan proses ke arah kesempurnaan demokrasi. Oleh sebab itu diperlukan suatu prasyarat politik, ekonomi dan sosial, sehingga pemilu dapat berperan dengan baik dalam kehidupan politik di Indonesia.
2. Pemilu di Indonesia selama masa pemerintahan orde baru mengalami perkembangan ke arah kemajuan. Akan tetapi peran pemilu sebagai sarana rekrutmen politik, input dan output politik masih belum nampak walaupun pemikiran ke arah itu sudah nampak; paling tidak pada pemikiran elite, birokrat dan teknokrat. Pemilu di Indonesia masih belum berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat, sehingga nilai-nilai demokrasi masih perlu penerapan di dalam proses kehidupan politik di Indonesia.
3. Peran pemilu sebagai proses rekrutmen politik belum berperan sepenuhnya, sebab prosesnya lebih banyak dilakukan di luar pemilu oleh partai politik dan Golkar. Sehingga pemilu seakan-akan merupakan sarana legitimasi kekuasaan yang sebelumnya telah disusun oleh partai politik dan Golkar.
4. Hasil pemilu di Indonesia belum sepenuhnya memberikan aspek input terhadap supra struktur politik, hal ini disebabkan karena
 - a. Pemilu tidak langsung memilih calon anggota legislatif.

- b. Budaya politik Indonesia yang bersifat parokial subyek di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak.
- c. Sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar di masyarakat.
- d. Kecenderungan budaya politik di Indonesia yang masih mengukuhi sifat paternalisme dan sifat patrimonial.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

1. Suara Merdeka; 9 Maret 1995.
2. Masoed, Mochtar dan Mac Andrews, Colin; Perbandingan Sistem Politik; Gadjah Mada University Press; Yogyakarta; 1987.
3. Almond, Gabriel dan Verba, Sidney; Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara; Bina Aksara; Jakarta; 1984.
4. Kantaprawira, Rusadi; Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar; Sinar Baru; Bandung; 1985.
5. Surbakti, Ramlan; Perbandingan Sistem Politik; Macphiso Grafika; Surabaya; 1984.
6. Suseno, Franz Magnis; Etika Jawa; Gramedia; Jakarta; 1985.
7. Almond, Gabriel dan Powell, John; Comparative Politics a Developmental Approach; Little Brown; Boston; 1966.
8. UUD 1945, P-4, GBHN; BP-7 Pusat; Jakarta; 1993.